

Jokowi Singgung Penyedia Barang di TNI Tak Berubah, Anggota DPR Beri Saran

Presiden Jokowi prihatin bahwa pengadaan barang TNI kerap impor dan produsennya tak variatif. Ia mendengar dari Menkomarves Luhut B Pandjaitan, penyedia produk militer masih berasal dari produsen yang sama selama bertahun-tahun. Anggota Komisi I Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung harapan Jokowi agar produk militer lebih variatif dan tak banyak banyak impor. Ia juga mendorong ada kebijakan yang lebih afirmatif dalam pengadaan barang TNI. "Karena sifatnya , industri pertahanan perlu kebijakan afirmatif atau kepastian pembelian yang keberlanjutan," kata Bobby saat dihubungi wartawan, Rabu (15/3). Bobby mengakui memang sulit mengawasi belanja militer. Sebab selama ini, DPR hanya bisa mengandalkan BPK hingga BPKP dalam pengawasan tersebut. "Kami masih meyakini dalam konteks pembelian dengan memastikan instrumen pemeriksa negara bekerja, mulai dari BPK, BPKP untuk sebelum menjadi DIPA, Inspektorat Jenderal dan sebagainya, dan Raker bersama Kemenhan beserta TNI untuk memastikan adanya koordinasi," jelasnya. Secara terpisah, anggota Komisi I yang juga berasal dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, mengatakan ada asosiasi penyedia barang militer. Ia berharap, asosiasi ini bisa membuat gebrakan baru agar tak ada 'permainan' dalam pengadaan barang TNI, karena kerap berasal dari penyedia yang sama. "Konsep dari Presiden adalah mendorong belanja barang dalam negeri sehingga harus meningkatkan investasi. Kita harus mengoptimalkan kemampuan anak bangsa dalam membuat produk-produk pertahanan yang sesuai dengan kondisi lapangan di Indonesia," kata Dave.